

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Hak Pekerjaan yang Layak Melalui Pelatihan di Yayasan Lumintu Kabupaten Sidoarjo

Risa Mia Andriyani

14040254021 (S1 PPKn, FISH, UNESA) Risamia29@gmail.com

Rr. Nanik Setyowati

0025086704 (S1 PPKn, FISH, UNESA) Rr_nanik_setyowati@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan proses pemberdayaan serta hambatan penyandang disabilitas yang dilakukan Yayasan Lumintu melalui pelatihan demi terpenuhinya hak pekerjaan yang layak. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif, informan penelitian yakni pembina, pengurus (ketua 2 dan wakil sekretaris) Yayasan Lumintu dan 5 penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan Yayasan Lumintu bekerja sama dengan Dinas Sosial dan perusahaan mitra di antaranya JAI, SAI, Young Tree, UFI, Pabrik Sido Jangkung, dan Fisrt Media Farma. Pelatihan dan perekrutan lapangan pekerjaan tidak hanya pada sektor informal namun juga sektor formal. Berbagai jenis penyandang disabilitas memiliki kesempatan sama untuk mengikuti pemberdayaan dan memperjuangkan haknya, namun pemanfaatan yang diambil berbeda karena integrasi keseluruhan elemen pendukung masih tumpang tindih antara pihak Yayasan Lumintu, keluarga, dan penyandang disabilitas, sehingga pemberdayaan yang diharapkan dari awal hingga akhir, hasil pemberdayaan bagi penyandang disabilitas belum berhasil. Hambatan yakni kondisi, kemampuan, serta minat penyandang disabilitas, kriteria perusahaan pada saat perekrutan dan dana menyebabkan pelaksanaan pemberdayaan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Penyandang Disabilitas, Hak Pekerjaan yang Layak

Abstract

The purpose of this study to describe the process empowerment as well as obtacle of person with disabilities by training for the sake of the fulfillment of decent work right. The research method used qualitative descriptive, where the research informants are builder, board (leader 2 and vice secretary) of Lumintu Foundation and 5 person with disabilities. The result of this study indicates that the empowerment of Lumintu Foundation in collaboration between the society and partner companies such as JAI, SAI, Young Tree, UFI, Pabrik Sido Jangkung, and First Media Farma. Training and employment is not only in the informal sector but also in the formal sector. Different types of person with disabilities have equal opportunity to follow the empowerment and fight for their right but the utilization was different because the overall integration of the supporting element was still overlapping between of the Lumintu Foundation, the family, and the people with disabilities, so that the expeted empowerment from start to finish, person wih disabilities have not succeeded. All able to realize it because of their constraints, potential person with disabilities interest, criteion of company at the time of recruitment and funds causes the implementation of empowerment cannot be implemented maximally.

Keywords: Empowerment, Inclusive Citizenship, Right to Decent Work

PENDAHULUAN

Setiap warga negara memiliki kedudukan dan kesempatan sama dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Berbagai instrumen HAM menjamin persamaan hak bagi penyandang disabilitas agar mampu beraktivitas layaknya orang normal, sebagaimana memperoleh hak pekerjaan yang layak telah diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikaji bahwa memperoleh hak pekerjaan layak diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup penyandang disabilitas yang berada pada kondisi ekonomi di bawah garis kemiskinan. Namun kenyataannya meskipun berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas, masih terdapat diskriminasi yang terjadi didalam masyarakat akibat stigma negatif kondisi fisik atau mental penyandang

disabilitas sebagai suatu hambatan untuk berkembang. Akibat hal tersebut kesempatan guna memperbaiki taraf kehidupan yang layak jauh dibawah standart, karena ketidakpercayaan terhadap kemampuan atau potensi penyandang disabilitas dalam bersaing bersama non penyandang disabilitas saat terjun kerja di sektor informal maupun formal. Sebagaiman seperti yang dikemukakan oleh Marshall (dalam Turner, 2009: 67) bahwa masalah kewarganegaraan mengalami pengecualian dalam hak sosialnya sehingga menimbulkan ketimpangan baik terjadinya pasar bebas, pengangguran, dan persaingan semakin menjatuhkan, dan akan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak orang lain.

Kabupaten di Jawa Timur yakni Sidoarjo merupakan daerah yang memiliki permasalahan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas, dalam memperoleh pekerjaan yang layak masih rendah meskipun terletak di sebelah selatan Kota Surabaya dan sebagai Kabupaten penyangga pengembangan perekonomian dan industri Kota metropolis Surabaya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur jumlah penduduk Sidoarjo pada tahun 2017 mencapai 2.218.119 jiwa mengalami kenaikan dari jumlah penduduk pada tahun 2016 bekisar 2.119.171 jiwa data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sidoarjo. Kemudian, jumlah penyandang disabilitas parah berdasarkan sensus penduduk 2010 dilakukan oleh Badan Pusat Statistika di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 sekitar 14.212 jiwa dengan jumlah penduduk miskin di Sidoarjo dikeluarkan Badan Pusat Statistika tahun 2017 sekitar 135.420 jiwa, jumlah angkatan kerja menurut data dari Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur tahun 2017 sekitar 64.54% ditunjang perindustrian tahun 2014 sebanyak 16.657 unit usaha. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak memperatakan kesempatan kerja bagi penduduknya tidak terkecuali penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas agar bisa memiliki kesetaraan dalam memperoleh haknya dengan orang normal umumnya, pada dasarnya tidak hanya peran pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut, namun perlu adanya pengitegrasian antara seluruh elemen pendukung mulai dari instrumen HAM penguat kedudukan penyandang disabilitas, *stakeholders* baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk turut mewujudkan pengaplikasian pemenuhan hak-hak orang-orang dalam pengecualian agar tidak lagi adanya diskriminasi. Keikutsertaan masyarakat sangat diperlukan dalam membantu penyandang disabilitas memperoleh hak, maka salah satunya diperlukan adanya pemberdayaan diri untuk menggali potensi atau kemampuan yang dimiliki penyandang disabilitas sebagai bekal agar kondisi

kecacatan menjadi stigma buruk melekat pada dirinya dapat dihilangkan melalui bukti bahwa mampu beraktivitas seperti orang normal dengan dibentuk organisasi kemasyarakatan baik berupa yayasan atau lembaga swadaya masyarakat dengan tujuan sosial. Sebagaimana telah diatur didalam UU No. 39 Tahun 1999 pasal 100 tentang partisipasi masyarakat yang berbunyi bahwa : “Setiap orang, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia”. Menurut Uning (dalam Muladi (Ed.), 2009: 262-263) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya terus didasari oleh prinsip pemilihan kepada mereka yang lemah dan dilemahkan, agar mampu mengubah kondisi dan posisinya. Pada pengertian pemberdayaan ini merupakan kegiatan dalam memperbaiki kualitas kehidupan penyandang disabilitas dengan melakukan berbagai hal untuk melatih dan mengembangkan kemampuan diri. Peran berbagai pihak diperlukan sebagai kelompok penyalur membantu melalui pembinaan, pelatihan, advokasi agar memiliki kemandirian didalam dunia kerja.

Permasalahan hak memperoleh pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo yang masih rendah, menjadi awal sebuah Yayasan yang didirikan oleh masyarakat dalam mengatasi keresahan tersebut berdiri yakni Yayasan Lumintu. Yayasan ini berdiri dilatarbelakangi karena banyaknya alumni SLB-B Dharma Wanita Kabupaten Sidoarjo setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas dan telah berusia 15 tahun keatas termasuk usia kerja/produktif namun tidak memiliki pekerjaan baik di sektor informal maupun formal. Dari permasalahan tersebut akhirnya Yayasan Lumintu melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial, serta perusahaan-perusahaan mitra di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka upaya perwujudan pemberdayaan berupa pelatihan guna mampu melahirkan kemandirian serta jiwa wirausaha bagi penyandang disabilitas, serta mencetak tenaga kerja penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi kerja di dunia industri.

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dapat diambil rumusan masalahnya yaitu (1) Bagaimana pemberdayaan penyandang disabilitas (*inclusive citizenship*) dalam memperoleh hak pekerjaan yang layak melalui pelatihan di Yayasan Lumintu Kabupaten Sidoarjo? (2) Apa saja hambatan yang dialami selama pemberdayaan penyandang disabilitas (*inclusive citizenship*) dalam memperoleh hak pekerjaan yang layak melalui pelatihan di Yayasan Lumintu Kabupaten Sidoarjo? Setelah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pengembangan kajian tentang upaya pemenuhan hak kewarganegaraan inklusi dengan melakukan pemberdayaan yang tepat bagi penyandang

disabilitas. Pengkajian proses serta hambatan selama pemberdayaan menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, yakni masyarakat merupakan organisme hidup melakukan segala aktivitas kehidupan bersama orang lain berkaitan dengan kedudukan atau status sosial setiap individu di dalamnya karena status sosial diperuntukkan untuk mempengaruhi perbedaan maupun kesamaan sistem sosial dan sistem biologis (Poloma, 2004: 23). Teori Talcott Parsons tentang fungsionalisme struktural menjelaskan empat fungsi digunakan sebagai persyaratan sistem tindakan yakni model AGIL meliputi *Adaptation* (A), *Goal Attainment* (G), *Integration* (I), dan *Latency (pattern maintenance)* (L) (Rocher dalam Raho, 2007: 53). Fungsi tersebut di dalam kehidupan masyarakat meliputi: 1. Adaptasi (*adaptation*) supaya masyarakat bisa bertahan dia harus mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan dirinya. 2. Pencapaian tujuan (*goal attainment*) sebuah sistem harus mampu menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan itu. 3. Integrasi (*integration*) masyarakat harus mengatur hubungan diantara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal. 4. *Latency* atau pemeliharaan pola-pola yang sudah ada, setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan membaharui baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi-motivasi.

Dari keempat persyaratan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan lain antara tindakan sosial yang terjadi pada masyarakat karena, pertama adaptasi atau penyesuaian individu masyarakat pada lingkungannya agar mampu berkembang dan bertahan hidup melalui misalnya bekerja sebagai upaya mendapatkan uang nantinya dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Kedua, tujuan suatu masyarakat dan tiap individu memiliki hubungan sebagai warga negara, jika masyarakat kolektivitasnya tinggi dengan perencanaan berbagai pihak lain halnya tujuan individu berbeda berdasarkan kepentingan masing-masing. Ketiga integrasi masyarakat terwujud apabila mampu bekerjasama antara individu-individu, individu-kelompok, dan kelompok-kelompok agar kemampuan darinya dapat berfungsi dengan semestinya apabila adanya dukungan dari berbagai pihak misalnya, hak untuk hidup bagi individu sebagai warga negara, untuk menjamin semua itu pemerintah harus membuat UU untuk melindungi dan menjamin hak warga negaranya. Keempat, latensi atau pemeliharaan dimaksud bagaimana seorang individu ketika masih kecil awalnya proses belajar berasal di keluarga, kemudian ketika sudah memasuki usia sekolah akan bertambah tidak hanya lingkungan keluarga dalam

proses belajarnya namun juga lingkungan sekolah, berproses menjadi dewasa kemudian bekerja sesuai bidangnya, menunjukkan adanya pemeliharaan budaya dari awal proses hingga akhir (Johnson, 1986: 135-136).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, karena hasil permasalahan perilaku dan persepsi, akan disajikan berupa kata-kata serta data yang didapat dari wawancara, observasi, dan dokumentasi (Moleong, 2013:11). Informan penelitian ini dalam penentuannya menggunakan teknik pengambilan sampel nonprobability sampling yakni pengambilan sampel dengan tidak membiarkan setiap unsur anggota populasi dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2008: 53). Sehingga informan penelitian ini yakni pembina, pengurus (ketua 2 dan wakil sekretaris), dan penyandang disabilitas Yayasan Lumintu.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam untuk menggali data terkait proses pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Yayasan Lumintu, observasi partisipan digunakan untuk mengetahui aktivitas penyandang disabilitas selama pelatihan hingga perekrutan kerja di perusahaan, dan dokumentasi untuk memperoleh data terkait arsip kegiatan pemberdayaan, program kerja Yayasan, daftar penyandang disabilitas ikut pelatihan dan perekrutan kerja di perusahaan mitra. Teknik keabsahan data menggunakan, triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data, pemilihan triangulasi tersebut karena pada triangulasi sumber, kredibilitas sumber akan mudah dilakukan melalui mengecek data dari beberapa sumber informan penelitian yakni atasan, bawahan, dan teman dan menggunakan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan sumber yang sama namun menggunakan teknik berbeda, mulai dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk dilakukan pengecekan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2008: 127).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini, menghasilkan data terkait proses serta hambatan yang terjadi selama pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Lumintu kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo. Pemberdayaan dilakukan berupa pelatihan yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo guna menunjang pembiayaan pelaksanaan pelatihan, sedangkan pada perekrutan kerja di sektor formal sebagai *output* dari diadakannya pelatihan bekerjasama dengan perusahaan mitra Yayasan yakni mulai dari JAI (Jatim Autocomp Indonesia), SAI (Surabaya Autocomp Indonesia), *Young Tree*, *First Media Farma*, UFI (*United Framatic*

Indonesia), dan PT. Sido Jangkung (Pabrik Kayu), dan pengupayaan pekerjaan yang layak di sektor informal guna mencetak jiwa wirausaha pada diri penyandang disabilitas.

Hak Mengembangkan Potensi Diri di Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas

Proses awal pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Lumintu kepada penyandang disabilitas yakni mulai dari perekrutan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, hingga tindak lanjut yang di upayakan setelah pelaksanaan pelatihan meliputi memfasilitasi usaha sesuai jenis pelatihan yang telah dilaksanakan dan menyalurkan tenaga kerja penyandang disabilitas agar mampu bekerja di perusahaan mitra Yayasan. Sebagaimana observasi pada tanggal 21-27 Februari 2018 perekrutan pelatihan dilakukan oleh Yayasan Lumintu melalui kerjasama berbagai pihak dari sekolah asal penyandang disabilitas menamatkan pendidikan menengah atas, orang tua alumni, dan Dinas Sosial. Pelaksanaan mulai dari informasi pihak Dinas Sosial dalam penganggaran dana serta jadwal pelatihan yang akan dilaksanakan di Yayasan Lumintu, kemudian penyebaran informasi adanya pelatihan keseluruhan koneksi K3S *group whatsapp* milik Yayasan Lumintu. Sebagaimana didukung oleh petikan wawancara yang dikemukakan oleh pembina Yayasan Lumintu Endang Sulistyorini, berikut petikan wawancaranya.

“...Pertama syaratnya warga Sidoarjo karena ini dana APBD Kabupaten Sidoarjo jadi harus orang Sidoarjo dari luar tidak boleh ikut, yang kedua usia 16 tahun keatas yang prioritas, kalau jenis-jenisnya kita mau ngadain diklat apa? Misalkan tuna rungu kita ngadain diklat ini, untuk tuna grahita seperti apa, tuna daksa mempunya dimana, maka kita lihat, mempunya tuna daksa ini gimana, jadi kita *assessment* dulu...” (Wawancara, 21 Februari 2018)

Berdasarkan petikan wawancara tersebut, bagi penyandang disabilitas yang akan mengikuti pelatihan di Yayasan Kumintu harus memenuhi persyaratan agar dapat diterima yakni paling penting warga Sidoarjo dan berumur diatas 16 tahun keatas, kemudian jenis-jenis pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, melalui penilaian dahulu sebelum pelaksanaan pelatihan. Juga disampaikan oleh pengurus (ketua 2) Yayasan Lumintu Nurul Hidayah.

“...Iya pelatihan disini kan menyesuaikan jenis kecacatannya mbak, gini ini ya kayak *pudding jelly art* ini untuk anak tuna grahita ringan boleh, tuna rungu disesuaikan kalau anak-anak gak (tidak) mampu juga gak (tidak) bisa mbak. Kalau pelatihan desain grafis terus bagi tuna grahita kan nanti enggak (tidak) mampu enggak (tidak) seberapa mampu...” (Wawancara, 05 Maret 2018)

Penentuan jenis pelatihan yang akan dilakukan bahwasannya penting terlebih dahulu tahu pelatihan yang

cocok bagi penyandang disabilitas disesuaikan berdasarkan kondisi kecacatannya. Hal tersebut juga diungkapkan oleh pengurus (wakil sekretaris) Yayasan Lumintu Suparti, berikut petikan wawancaranya.

“...Persyaratannya hanya ini KTP sama KK aja domisili Sidoarjo, karena yang mendanai pelatihan ini kan Dinsos, KK sama KTP itu aja untuk usia diatas 17 tahun dan tidak ada perbedaan pelatihan bagi penyandang disabilitas jenis kelamin perempuan maupun laki-laki...” (Wawancara, 08 Maret 2018)

Hal tersebut juga diperkuat data, saat dilapangan yakni catatan persyaratan peserta yang mengikuti pelatihan yakni warga yang berdomisili di Sidoarjo dengan bukti KTP, berusia 15 keatas, dan laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana pada pelatihan tata boga dengan macam pelatihan meliputi *pudding jelly art*, bolu batik, dan *pudding jelly cream* yang mengikuti yakni tuna rungu dan tuna grahita ringan.

Tabel 1. Daftar Penyandang Disabilitas Pelatihan Tata Boga

No	Nama	Jenis Penyandang
1	Elis Nur Azizah	Tuna rungu
2	Jafar Isa Setiawan	Tuna rungu
3	Sayidatul Irmania	Tuna rungu
4	Ananda Aulia Ramadhani	Tuna rungu
5	Yulia Indah Lestari	Tuna rungu
6	Nadia Pratita	Tuna rungu
7	Innayatul Izza	Tuna rungu
8	Oni Rachma Fimiati	Tuna rungu
9	Faizatun Nadlifah	Tuna rungu
10	Lailatul Risma Sholichah	Tuna rungu
11	Sukma Hera Iga Kristina	Tuna rungu
12	Ayunda Mafazati Rohmah	Tuna rungu
13	Opi Apianti	Tuna grahita
14	Prita Nova Denanti	Tuna grahita
15	Muhammad Baihaqi	Tuna grahita
16	Aswam Ramadhan	Tuna grahita
17	Mochammad Faisal Arief Rachman	Tuna grahita
18	Fariz Dian Ramadhan	Tuna grahita
19	Al Hilal Thamtom Barid	Tuna grahita
20	Era Wahyu Pratiwi	Tuna grahita

Sumber : Dokumen Yayasan Lumintu

Berdasarkan petikan wawancara antara pembina, pengurus (ketua 2), dan pengurus (wakil sekretaris) serta data diatas menunjukkan bahwasannya persyaratan penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan

didasarkan berbagai pertimbangannya yakni usia, jenis penyandang disabilitas, domisili, dan kemamouan yang cocok berdasarkan kesulitannya menentukan pelatihan yang akan dilaksanakannya, sebagaimana tuna rungu dan tuna grahita ringan yang mampu mengikuti pelatihan tata boga tersebut, dan tidak ada perbedaan jenis kelamin. Alasan terkait penyesuaian jenis kecacatan dilakukan guna mengetahui kebutuhan di setiap masing-masing jenis kesulitan yang dihadapinya, karena berhasil kegiatan pelatihan tergantung mampu diterima dan diaplikasikan nantinya di lingkungan sekitar, sehingga pemilihan pelatihan dilakukan pada 05-21 Maret 2018 berupa pelatihan tata boga, dimana selain tata boga terdapat pelatihan tata kecantikan dan menjahit bertujuan mempersiapkan penyandang disabilitas memiliki kemandirian untuk berwirausaha di sektor informal baik membuka usaha *cathring* makanan suatu acara, membuka salon, atau jasa jahit. Pada penentuan jenis pelatihan tata boga berdasarkan alasan yang disampaikan oleh pembina Yayasan Lumintu Endang Sulistyorini.

“...Itu diperuntukkan bagi penyandang disabilitas jenis tuna rungu dan tuna grahita ringan, karena yang mampu ke ranah itu hanya itu, bisa sih tuna daksa tapi tuna daksa yang ringan, yang tangannya gak (tidak) tremor yang masih punya tangan lengkap soalnya kalau punya tangan tremor gak (tidak) bisa, karena membatik kalau tremor coba banyango ae yo (coba bayangkan saja ya) kan gak (tidak) bentuk padahal batik perlu tangan luwes (terampil)...” (Wawancara, 21 Februari 2018)

Hasil petikan wawancara tersebut dapat diketahui bahwasannya penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna grahita memiliki peluang ikut jenis pelatihan tata boga lebih besar dari tuna daksa. Jika pelatihan tata boga diperuntukkan bagi tuna rungu dan tuna grahita ringan, maka jenis pelatihan lainnya juga disesuaikan berdasarkan kemampuan penyandang disabilitas. Setelah selesai proses perekrutan peserta pelatihan, dalam melaksanakan kegiatan pelatihan penyandang disabilitas memiliki kesempatan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya pada saat proses pelatihan berlangsung, mulai dari awal pembukaan hingga penutupan acara pelatihan. Berbagai upaya dilakukan pihak Yayasan Lumintu agar pelatihan dapat berjalan lancar dan mampu mengasah potensi diri untuk mempersiapkannya dalam dunia kerja baik di sektor formal maupun informal. Kegiatan awal dimulai dari awal pembukaan hingga penutupan, dilaksanakan setiap tahunnya pada tahun 2018 ini diadakan pelatihan tata boga jenis pelatihannya meliputi *pudding jelly art*, bolu batik, dan *pudding jelly cream*, sebagaimana proses pelatihan di ungkapkan oleh pembina Yayasan Lumintu Endang Sulistyorini sebagai berikut.

“...Ee gini (begini) saya mau praktek (praktik) nugget ayam kita masih demo besoknya sudah

enggak (tidak) demo lagi tapi (praktik) terbimbing dengan bantuan terus lusa praktek (praktik) mandiri ada tahap-tahapnya, kalau kita hanya demo terus saat itu praktek (praktik) sesok (besok) gampang (mudah) lali (lupa), ojek (jangan) toh seng (yang) tuna grahita, kita sendiri loh (kalau) melok (ikut) demo masak seperti di cateti (dicatat) meneh dikon praktek (praktik) gurung tentu iso (lagi disuruh praktik lagi belum tentu bisa), jadi demo praktek (praktik) terbimbing, terus besoknya lagi praktek (praktik) terbimbing, terus besoknya lagi praktek (praktik) dengan bantuan, dan praktek (praktik) mandiri, pinter yawes (pinter yasudah)...” (Wawancara, 21 Februari 2018)

Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat dikaji bahwa terdapat tahap-tahap pelaksanaan pelatihan yang terencana dengan mengukur kemampuan penyandang disabilitas, diperkuat oleh data dan observasi lapangan pada tanggal 8-10 terkait pelaksanaan pelatihan dan jadwal pelatihan yang telah dibuat yakni mulai dari 1. Pembukaan, 2. Demo membuat pudding jelly art, 3. Praktik terbimbing, 4. Praktik mandiri, dan seterusnya diulangi seperti itu untuk jenis pelatihan lain yakni bolu batik dan *pudding jelly cream*. Pada pelaksanaan pelatihan narasumber dalam hal ini sebagai instruktur pelatihan dan Dinas Sosial ikut serta membantu berjalannya pelatihan. Namun tidak semua jenis pelatihan yang dilakukan oleh Yayasan Lumintu bertujuan guna memberikan bekal kemandirian untuk kerja di sektor informal, tetapi mencetak juga tenaga kerja penyandang disabilitas untuk terjun di sektor formal dengan bekerja di perusahaan mitra atau industri yakni pelatihan desain grafis dan menjahit. Disampaikan oleh pernyataan dari pembina Yayasan Lumintu Endang Sulistyorini.

“...Endak (tidak) terpisah mbak, jadi gini misalkan Dinas Sosial kan membantu penyandang disabilitas untuk bisa hidup mandiri, ketika anak yang belum bisa apa-apa bisa hidup mandiri bagaimana melalui adanya diklat? Setelah diklat sudah dibantu, sehingga setelah dibantu ini pengembangannya anak ini bisa enggak (tidak) mengembangkan diri dari hasil diklat ini, kalau tidak bisa berarti kita arahkan ke perusahaan. Perusahaan butuh tenaga kerja seperti apa kalau yang bisa berarti wirausaha...” (Wawancara, 21 Februari 2018)

Petikan wawancara tersebut menyebutkan jika Dinas Sosial juga ikut serta membantu dalam hal memberikan dana kepada Yayasan Lumintu bagi pelatihan penyandang disabilitas, melalui diskusi terlebih dahulu dengan Yayasan Lumintu selaku tempat dan wadah pencari penyandang disabilitas yang mau dan mampu ikut melaksanakan pelatihan. Berdasarkan hasil pelatihan nantinya diharapkan penyandang disabilitas mampu hidup mandiri dengan kemampuannya setelah mengikuti pelatihan. Juga nantinya tidak bisa dikembangkan dalam berwirausaha penyandang disabilitas bisa diarahkan ke

perpustakaan mitra Yayasan Lumintu. Hal serupa juga dikemukakan oleh pengurus (ketua 2) Yayasan Lumintu Nurul Hidayah, terkait pelatihan yang nantinya dilaksanakan oleh Yayasan Lumintu di peruntukkan bagi penyandang disabilitas untuk bisa memperoleh hak pekerjaan di sektor informal namun juga di sektor formal, berikut petikan wawancaranya.

“...Bedanya itu enggak (tidak) banyak mbak misalnya kalau kita adakan pelatihan menjahit lha kan pelatihan menjahit baju kalau anak-anak nanti ada yang diterima di bagian pasang tali sepatu kan ilmu dari menjahitnya itu ada meskipun enggak (tidak) *linier* ilmu menjahitnya tentang baju atau sepatu kan seenggaknya ilmu menjahitnya itu bisa diterapkan mbak. Kalau di sepatu ya jahitnya kepakek (kepakai) disitu kalau di yang lain kan terutama kedisiplinan kayak *packing* gitu kan kecepatan...” (Wawancara, 05 Maret 2018)

Hak Memperoleh Kesempatan/Aksesabilitas untuk Mandiri

Pengembangan kemampuan penyandang disabilitas dalam mempersiapkannya terjun bersaing memperoleh pekerjaan yang layak dimaksimalkan agar dapat bermanfaat tidak hanya mampu digunakan ketika setelah selesai pelatihan dengan membuka usaha sendiri namun juga mampu bersaing dengan non penyandang disabilitas untuk menjadi tenaga kerja di perusahaan sepatu (Young Tree), sebagaimana data yang didapatkan dilapangan pada tanggal 30 Maret 2018 diantaranya: 1. Moch. Bahrul Ulum, 2. Priambodo, 3. Adi Wahyudi, dan 4. Lasiono bekerja di perusahaan dalam bidang menjahit sepatu. Terlaksananya pelatihan tersebut terjalin hubungan Yayasan Lumintu dengan Dinas Sosial dalam hal pemberdayaan berupa pelatihan bagi penyandang disabilitas juga disampaikan dalam petikan wawancaranya pengurus (ketua 2) Yayasan Lumintu Nurul Hidayah.

“...Kalau pelatihan itu kami kerjasama dengan Dinas Sosial, kita mengajukan biasanya pelatihan satu tahun sekali ya bulan Maret biasanya kebetulan sekarang Maret ya, kita mengajukan proposal yang diharapkan pelatihan apa ini tadi yang dilaksanakan mulai hari ini, misalnya *pudding jelly art*, bolu batik, sama *pudding jelly cream* yang dilaksanakan 14 hari tanggal 05 hingga tanggal 21 Maret, itu kita ngajikan (mengajukan) proposal ke Dinas Sosial, kalau disetujui oleh baru kita jalan...” (Wawancara, 05 Maret 2018)

Kerjasama tersebut hingga menjadikannya pelatihan terlaksana setiap tahunnya sekali dalam jangka waktu 14 hari atau 2 minggu dengan jenis pelatihan yang telah disepakati dari pihak Yayasan dengan Dinas Sosial. Dalam pelaksanaannya pelatihan tersebut juga diungkapkan oleh peserta pelatihan yakni Elis Nur Azizah (Tuna Rungu) dalam petikan wawancaranya.

“...Ya selama 14 hari atau 2 minggu dari tanggal 05 sampai 21 Maret nanti kita ikut pelatihan,

disini kita diajari instrukturnya terus diajari bu Endang juga buat *pudding jelly art*, bolu batik, dama *pudding jelly* ceram. Aku seneng (senang) disini banyak teman dari berbagai daerah di Sidoarjo, temenku (temanku) yang ikut pelatihan disini ada 20 orang, aku juga seneng (senang) bisa belajar ilmu lagi, kita dilatih terus sama mereka dari pagi kita berangkat setiap hari jam 8 pulang jam 2 siang juga dapat makan terus pulang...” (Wawancara, 13 Maret 2018)

Proses pelatihan juga disampaikan oleh peserta pelatihan lainnya yakni Era Wahyu Pratiwi (Tuna Grahita) dalam petikan wawancaranya.

“...Ya dilatih masak kayak gini, buat *pudding jelly art* seperti ini diajari bu Endang sama bu Sofiyah yang didepan bisa buat *pudding* sampai kayak gini ditaruh wadah, terus tadi dimasak dulu bahannya terus bisa jadi gini pelatihan dapat makan juga tiap hari seneng (senang) sama temen-temen (teman-teman)...” (Wawancara, 13 Maret 2018)

Diperkuat pula dari ungkapan peserta pelatihan yakni Jakfar Isa Setiawan (Tuna Rungu) terkait proses pelatihan selama 2 minggu yang dilaksanakan Yayasan Lumintu yakni:

“...Ini aku tadi aku lagi buat *pudding jelly cream* diajari bu Sofi aku bisa masak dilatih disini, terus juga masaknya bareng teman-teman jadi lebih mudah dan aku juga didampingi sama ibu-ibu yang ada disini agar bisa buat sesuai arahan instrukturnya kemarin juga habis buat *pudding jelly art* sama bolu batik...” (Wawancara, 14 Maret 2018)

Berdasarkan petikan wawancara diatas tersebut, dapat dicermati pula pada hasil observasi pada tanggal 14 Maret 2018 yang didapatkan dilapangan bahwa pelaksanaan pelatihan dilaksanakan dengan bantuan instruktur sebagai orang yang tahu dan paham pembuatan produk yang dilatihkan kepada penyandang disabilitas. pihak panitia penyelenggara yakni dari Yayasan Lumintu memiliki peran agar penyandang disabilitas mampu memahami materi yang disampaikan instruktur melalui bahasa isyarat dan bahasa tubuh. Terkait proses pelatihan yang dibantu oleh adanya instruktur juga diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan dalam petikan wawancara dengan pembina Yayasan Lumintu Endang Sulistyorini.

“...Dinas Sosial yang mempercayakan ke kita, kita yang mencari instruktur lha yang bayari instruktore yo (bayar instrukturnya ya) Dinas Sosial, soale (soalnya) kalau Dinas Sosial nyari instruktur kan belum tentu cocok untuk anak-anak, jadi dikasih dana dan yayasan yang mengelola...” (Wawancara, 21 Februari 2018)

Pemilihan instruktur pelatihan juga perlu adanya pertimbangan dari pihak Yayasan, guna pelaksanaan pelatihan dapat berjalan sesuai rencana dan tema yang akan dilatihkan kepada penyandang disabilitas. tidak

hanya disediakan instruktur dalam membina pelatihan, namun juga pembagian buku materi kepada penyandang disabilitas digunakan sebagai penunjang pelatihan dapat berjalan dengan lancar, sesuai yang disampaikan oleh pembina Yayasan Lumintu Endang Sulistyorini.

“...Ya tiap hari datang dia semangat kan juga dapat buku, dapat tas, dapat ilmu dapat (dapat) materi, terus kalau penutupan juga dapat uang saku...” (Wawancara, 28 Februari 2018)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh temuan data hasil lapangan terkait penyediaan fasilitas yang diterima penyandang disabilitas agar dapat dengan mudah memahami pelatihan yang diajarkannya dengan bantuan buku panduan materi pelatihan yang dilatihkan oleh Yayasan Lumintu yakni terkait prosedur pembuatan yang berisi *pudding jelly art* mulai dari bahan 1. (bahan dasarnya) serta cara membuat bahan 1, bahan 2. (bahan untuk bunga dan daun) serta cara membuat bahan 2, bahan 3. (bahan penutup, cetakan huruf, ikan dan lain-lain) serta cara membuat bahan 3. Kemudian, prosedur pembuatan bolu batik mulai dari bahan 1. (bahan dasarnya serta cara membuat bahan 1 dan bahan 2. (bahan untuk membuat cetakan bunga dan lain-lain), dan terakhir prosedur membuat *pudding jelly cream* mulai dari bahan dasarnya, dan bahan adonan bunga *jelly cream* serta cara membuatnya.

Buku panduan materi pelatihan dibagikan kepada seluruh peserta pelatihan guna mempermudah penyandang disabilitas dalam mempraktikkan perintah dari instruktur pelatihan selain menggunakan bahasa isyarat dari panitia Yayasan Lumintu. Bertujuan juga dalam hal mempermudah penyandang disabilitas mengembangkan kemampuan yang telah dimilikinya setelah ikut pelatihan dapat lebih mudah ingat dan tahu bahan serta cara membuat produk yang akan dipasarkannya apabila ingin berwirausaha. Terkait pelaksanaan pelatihan nantinya juga dimanfaatkan walaupun tidak secara langsung bisa di aplikasikan oleh penyandang disabilitas namun setidaknya ilmu yang diterimanya selama 14 hari atau 2 minggu mampu diserap dan dipelajari untuk kemudian hari. Berdasarkan hal tersebut diungkapkan oleh pembina Yayasan Lumintu Endang Sulistyorini, terkait hasil pelatihan.

“...Bisa dipakek (dipakai) sendiri kalau menjahit karena pelatihannya sendiri hanya 14 hari, ya minimal bisa dipakek (dipakai sendiri), ajdi minimal punya ilmunya. Kalau masak juga bisa kayak nugget bisa bikin terus dijual, nugget tempe, nugget tahu, nugget ayam, sama nugget daging...” (Wawancara, 28 Februari 2018)

Sama halnya yang dikatakan oleh pengurus (wakil sekretaris) Yayasan Lumintu Suparti terkait hal tersebut.

“...Ya kalau anak-anak tuna grahita ini diharapkan di rumah bisa buka warung seperti itu

kan ini pelatihannya boga kan diharapkan itu bisa membuka usaha sendiri, tapi selama anak ini anak-anak tuna grahita itu hanya bisa terkait tanggung jawabnya aja ya, walaupun kelihatannya normal namun mereka hanya sebatas membantu seperti itu...” (Wawancara, 08 Maret 2018)

Pemberdayaan berupa pelatihan diperuntukkan bagi penyandang disabilitas agar memiliki kemampuan atau keahlian dalam diri guna menyalurkan potensi yang dimilikinya mampu terwujud agar salah satu haknya memperoleh pekerjaan yang layak dapat terpenuhi sehingga terhindar dari kemiskinan yang telah menjadi stigma dalam masyarakat, salah satunya bekerja walaupun disektor informal yakni memiliki usaha kecil-kecilan sendiri, setidaknya menjamin dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya. Usaha yang nantinya dibangun oleh penyandang disabilitas juga perlu adanya kesinambungan agar dapat bertahan sesuai tujuan pelatihan yang dilaksanakan Yayasan Lumintu, pengurus (ketua 2) Yayasan Lumintu mengungkapkan hal tersebut.

“...Sebenarnya kalau ke anak-anak itu harus apa ya harus telaten (rutin) dengan apa yang disampaikan pada waktu pelatihan, kan setelah gitu sudah enggak (tidak) kecapek (kepakai), kita minta ke orang tuanya untuk mengembangkan anaknya, kalau misalkan anak ini pintar (pintar) dibidang ini selama di rumah dikembangkan dari orang tua jadi sama-sama berjuang ya kalau enggak (tidak) ada kesinambungan anatar pihak sekolah, pihak Yayasan, dan orang tua, nanti kita capek, sendiri terus gak (tidak) ada perkembangan sama sekali, ajdi sama-sama harus berjalan bareng (sama-sama)...” (Wawancara, 05 Maret 2018)

Berbagai faktor menjadi pertimbangan berhasil atau tidaknya hasil yang nantinya diharapkan dapat terwujud yakni salah satunya dari penyandang disabilitas sendiri. Kondisi penyandang disabilitas tersebut diungkapkan oleh pengurus (ketua 2) Yayasan Lumintu Nurul Hidayah sebagaimana berikut.

“...Iya itu Sufi itu kan dia alumni sini dulu juga pernah ikut pelatihan tapi sampai saat ini dia juga belum pernah kerja, soalnya dia kan anaknya pemalu ya juga pendiam jadi agak sulit kalau berinteraksi sama teman-temannya, dan orang tuanya kan orang yang berada kaya jadi ya mungkin Sufi semuanya merasa terfasilitasi, sehingga dia enggak (tidak) kerja pun enggak (tidak) apa-apa, ini aja saya ajak orang tuanya untuk mendorong dia buat kesini kalau mau ada lowongan pekerjaan di perusahaan dan baru mau kesini...” (Wawancara, 23 Maret 2018)

Keempat elemen penting harus bisa bekerjasama guna mewujudkan aksesabilitas penyandang disabilitas mengembangkan kemampuan yang telah dimilikinya.

Pengembangan tidak hanya dilakukan pada saat proses pelatihan juga setelah selesai pelatihan pun perlu dilakukan. Kondisi penyandang disabilitas tersebut apabila tidak diselesaikan dengan baik maka, menjadi salah satu hambatan yang terjadi pada dirinya waktu mengikuti pelatihan dan ketika selesai pelatihan, karena keinginan dalam diri tidak ada menyebabkan kesulitan untuk berkembang lebih baik dalam terjun ke dunia kerja. Hambatan yang dialami selama pelatihan, disampaikan oleh pembina Yayasan Lumintu Endang Sulistyorini, pada petikan wawancaranya yakni sebagai berikut:

“...Iya jadi kalau bagi anak tuna rungu pelatihan buat nugget itu 14 hari mereka bisa, kalau anak tuna grahita dekne (dia) bisa mahir itu paling (mungkin) 2 macem (macam) nugget, nugget ayam ambek (sama) nugget tempe yawes (yasudah) itu soale dibaleni (soalnya diulangi lagi) terus meneh ayam meneh ayam (lagi ayam lagi ayam) 3 hari terus tempe juga 3 hari nanti balik ke ayam lagi kadang iseh lali (masih lupa), kita selama ini masih menangani tuna grahita sama tuna rungu kalau tuna daksa ini belum ada ya, Sidoarjo tuna daksanya sekarang sudah menurun angkanya...” (Wawancara, 21 Februari 2018)

Tidak hanya pengembangan kemampuan yang dimilikinya, penyandang disabilitas mengalami hambatan juga salah satunya kondisi yang dialaminya, yakni seperti tuna grahita yang memiliki keterlambatan belajar dan susah untuk bisa memahami suatu hal, sehingga menyebabkan kemampuannya dalam berkembang sedikit sulit tercapai tidak seperti tuna tuna rungu yang kemampuannya bisa dibilang seperti orang normal hanya saja terhambat pada kondisi pendengaran dan berbicara. Hambatan lain dalam proses pelatihan juga dipaparkan oleh pengurus (wakil sekretaris) Yayasan Lumintu Suparti.

“...Hambatannya ini masalah dana mbak, kan kalau kita ngadain (mengadakan) pelatihan juga butuh dana besar mbak, lha seumpama dari kita sendiri kan enggak (tidak) mungkin karena dananya segitu banyaknya, ya jadi kita kerjasama dengan Dinsos, jadi Dinsos yang mendanai kita yang mencari...” (Wawancara, 08 Maret 2018)

Dana merupakan salah satu pendukung penting terlaksananya pelatihan di Yayasan Lumintu, yang mana apabila diadakannya pelatihan sumber dana perlu ada guna mendukung dapat terwujud dan berjalannya suatu kegiatan pelatihan atau tidak, karena seluruh keperluan pelatihan memerlukan dana seperti peralatan atau fasilitas, modul materi pelatihan, instruktur, akomodasi penyandang disabilitas selama pelatihan dan lain sebagainya. Sehingga hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan tidak hanya terkait penyandang disabilitasnya namun juga terkait sumber dana pelatihan.

Hal serupa juga disampaikan oleh pengurus (ketua 2) Yayasan Lumintu Nurul Hidayah, bahwa dana tidak hanya dana dari Dinas Sosial bagi Yayasan Lumintu waktu pada saat pelatihan. Namun, setelah pelatihan menjadi pertimbangan hasil pelatihan dapat dikembangkan oleh penyandang disabilitas ataupun tidak, berikut petikan wawancaranya.

“...Dari Dinas Sosial tidak ada pengawasan lagi setelah pelatihan, tapi suatu ketika itu tadi pernah sih mbak waktu sehabis pelatihan tata kecantikan dulu dirasa pengembangannya kurang bagi peserta pelatihan yang dulu pernah ikut maka dari Dinas Sosial buatin (membuatkan) salon kecantikan di dalam sini...” (Wawancara, 05 Maret 2018)

Berdasarkan hasil observasi di lapangan setelah proses selesainya pelatihan tata boga yang telah dilaksanakan Yayasan Lumintu yakni membuat *pudding jelly art*, bolu batik, dan *pudding jelly cream*, apabila pada pelatihan tata kecantikan mendapatkan tindak lanjut sebagai bentuk pengembangan pelatihan maka pada pelatihan yang telah dilakukan yakni tata boga tidak terdapat tindak lanjut baik dari Dinas Sosial maupun Yayasan Lumintu. Hal tersebut terjadi karena pada pelatihan tata boga bagi Yayasan Lumintu maupun Dinas Sosial menganggap bahwasannya penyandang disabilitas peserta pelatihan mampu mengembangkan usahanya dalam bidang boga dengan prospek kerja di masyarakat akan mudah diterima melalui berjualan seperti apa yang telah dilatihkan. Dalam hal ini dapat dianalisis bahwasannya pengembangan kemampuan penyandang disabilitas pada waktu pelatihan hingga setelah pelatihan membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak agar hak penyandang disabilitas dalam memperjuangkan memperoleh pekerjaannya dapat terpenuhi.

Hak Ikut Serta dalam Perekrutan Kerja di Perusahaan Mitra Yayasan

Hak setiap warga negara sama antara non penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas salah satunya dalam bersaing memperoleh hak pekerjaan yang layak baik disektor informal maupun formal, Yayasan Lumintu ini menjebatani penyandang disabilitas guna memperoleh hak tersebut salah satunya melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayasan namun tidak menutup harapan bagi penyandang disabilitas yang tidak ikut pelatihan untuk bisa juga dijembatani bekerja di perusahaan mitra Yayasan. Banyak penyandang disabilitas tidak hanya berasal dari Sidoarjo, dari luar Kabupaten Sidoarjo memiliki peluang untuk mendapatkan kesempatan ikut bersaing di dunia kerja melalui bantuan dari Yayasan Lumintu, namun bentuk kerjasama Yayasan Lumintu dengan perusahaan juga perlu diketahui, yang nantinya akan berdampak kepada

persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan kerja, berikut petikan wawancaranya pembina Yayasan Lumintu Endang Sulistyorini.

“...Sebetulnya saat itu perusahaan kesulitan mencari tenaga kerja yang disabilitas, kemudian menghubungi saya, bu di perusahaan saya membutuhkan tenaga kerja difabel karena aturan memang pemerintah UU No. 4 itu mewajibkan perusahaan itu minimum 1% harus ada tenaga kerja difabel, ok akhirnya kita pilih anak-anak yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi untuk bekerja di perusahaan itu prospeknya seperti apa baik diterima seperti itu mbak...” (Wawancara, 21 Februari 2018)

Hubungan antara penyandang disabilitas dengan perusahaan dahulunya akibat banyak perusahaan yang pada dasarnya membutuhkan tenaga kerja penyandang disabilitas namun perusahaan kesulitan mencari penyandang disabilitas usia kerja untuk bisa menjadi tenaga kerja di perusahaan, sehingga menjalin kerjasama atau MoU dengan Yayasan Lumintu untuk mempermudah penyalangan tenaga kerja penyandang disabilitas yang mampu dan berkompeten di perusahaan. Sama halnya yang disampaikan oleh pengurus (ketua 2) Yayasan Lumintu Nurul Hidayah terkait hal tersebut.

“...Itu berjalan, kita kan punya web ya, mungkin dibaca sama perusahaan, perusahaan kesini membangun kerjasama dengan kita. Tadinya kan seperti itu, tapi kan kita punya web dan akhirnya dibaca, kita kan gak (tidak) tahu ya perusahaan-perusahaan mana yang membutuhkan difabel ya tidak semua perusahaan itu mau difabel...” (Wawancara, 05 Maret 2018)

Perusahaan di Sidoarjo tidak semua membutuhkan tenaga kerja penyandang disabilitas, hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang mau menerima dan salah beberapa yang menerima atau membutuhkan tenaga kerja penyandang disabilitas yakni yang menjalin hubungan kerja dengan Yayasan Lumintu. Berdasarkan petikan wawancara tersebut juga didukung oleh perolehan data dari lapangan terkait perusahaan penyalin kerjasama dengan Yayasan Lumintu diantaranya PT. JAI (Jatim Autocomp Indonesia), PT. SAI (Surabaya Autocomp Indonesia), PT. Fisrt Media Farma (Pabrik Obat), PT. *Young Tree*, UFI (*United Farmatic* Indonesia/Pabrik Kosmetik) dan PT. Sido Jangkung (Pabrik Kayu). Berbagai perusahaan penyalin kerjasama dengan Yayasan Lumintu, pasti memiliki persyaratan dalam perekrutan tenaga kerja penyandang disabilitas, yang juga diungkapkan oleh pembina Yayasan Lumintu Endang Sulistyorini.

“...Yang jelas kriterianya belum menikah, usia dibawah 25 tahun mayoritas kalau di butuhkan di JAI, yang dibutuhkan itu jurusan SMA, sedangkan kalau di SAI tidak pandang laki-laki atau perempuan asal lolos tes psikotes sama

wawancara, usia dibawah 27 berarti usia 16-27 tahun, kalau *Young Tree* tidak ada batasan asalkan dia mau bekerja dan sehat jasmani dan rohani dan kalau dia pas lagi butuh ya bisa, kalau gak (tidak) lagi butuh gak (tidak) bisa. *First Media Farma* endak (tidak) ada kriteria biasanya dibutuhkan tuna rungu itu kalau pas lagi dibutuhkan ya telpon (telepon) kita kalau gak (tidak) ya gak (tidak) mbak, UFI kosmetik itu juga tidak ada, dan SAI, *First Media Farma*, *Young Tree*, dan UFI tidak menentukan jenis kecacatan, tapi kalau JAI itu kebanyakan tuna rungu mbak...” (Wawancara, 21 Februari 2018)

Berbagai persyaratan yang diajukan berbeda-beda sesuai kebutuhan perusahaan dalam menjaring tenaga kerja penyandang disabilitas, syarat umum yang biasanya digunakan perusahaan yakni terdapat batasan usia bagi tenaga kerja yang akan malar kerja dan peluang terbanyak mampu bersaing di dunia kerja memang dari keseluruhan perusahaan masih penyandang disabilitas jenis tuna rungu, baik perusahaan JAI, SAI, *Young Tree*, dan *First Media Farma*. Pernyataan diatas juga, dikemukakan oleh pengurus (ketua 2) Nurul Hidayah terkait persyaratan.

“...Ya syaratnya kalau di JAI ya lulus SMA, usia maksimal 25 tahun, belum menikah iya itu biasanya banyak dicari perempuan, kalau di JAI minta tuna daksa sama tuna rungu, tuna daksa itu yang ringan yang kakinya masih lengkap mungkin tangannya yang pencong (cacat) sedikit, kalau di SAI sama tapi tidak diprioritaskan perempuan jadi kesempatannya sama, kalau *First Media Farma*, UFI, sama *Young Tree* enggak (tidak) ada prioritas cewek atau kalau UFI kemarin juga menerima laki tapi banyak yang perempuan sih...” (Wawancara, 05 Maret 2018)

Jika menurut pembina Yayasan Lumintu Endang Sulistyorini JAI banyak memberikan peluang kepada tuna rungu namun lain halnya menurut pengurus (ketua 2) Yayasan Lumintu Nurul Hidayah yang menyebutkan bahwa tuna daksa memiliki peluang sama halnya tuna rungu. Tapi secara keseluruhan banyak perusahaan yang memang membuka peluang besar bagi tuna rungu karena berbagai faktor. Kemudian, jenis kelamin juga menjadi pertimbangan perusahaan menerima karyawan dan masih tenaga kerja penyandang disabilitas perempuan yang memiliki peluang besar. Berbeda halnya dengan apa yang disampaikan oleh pengurus (wakil sekretaris) Yayasan Lumintu Suparti terkait proses perekrutan.

“...Ijazah SMA, harus dari SMA, jika enggak (tidak) ya mungkin bisa mungkin SMP tapi etos kerjanya yang sekolah menjamin bahwa anak ini mampu ya jadi sekolah ya punya jaminan untuk itu bahwa kita mengantar alumni atau bukan, kesana bahwa anak ini benar-bener (benar-benar) mampu...” (Wawancara, 08 Maret 2018)

Perekrutan tenaga kerja tidak hanya terkait persyaratan administratif, namun kemampuan yang dimiliki penyandang disabilitas juga menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam menjaring tenaga kerja, etos kerja setiap penyandang disabilitas yang dapat dipertanggung jawabkan apabila pihak Yayasan mampu meyakinkan bahwa penyandang disabilitas yang mendaftar memiliki etos kerja yang mumpuni. Petikan wawancara tersebut juga diperkuat oleh hasil data yang didapatkan dilapangan terkait persyaratan perekrutan tenaga kerja di perusahaan yakni PT. JAI (Jatim Autocomp Indonesia) syaratnya maksimal usia 25 tahun, belum menikah, dan perempuan, kemudian PT. Sido Jangkung (Pabrik Kayu) persyaratannya SKCK, surat dokter, KK, akte, surat daftar riwayat hidup, foto 4x6 = 4 lembar, KTP, ijazah terakhir SMA-SMP boleh, surat lamaran, dan surat yayasan. Untuk PT. SAI, PT. *Young Tree*, dan PT. UFI (*United Farmatic* Indonesia) tidak terdapat catatan khusus dalam syarat perekrutan. Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi tersebut juga disampaikan oleh Dyas Gilang Pratama (Tuna Rungu) sebagai berikut:

“...Syaratnya saya bawa surat lamaran, daftar riwayat hidup, *fotocopy* KTP, *fotocopy* KK, *fotocopy* akte, surat keterangan sehat dari dokter, pas foto ukuran 4x6 (2 lembar), sama *fotocopy* SKCK ke bu Nurul soalnya saya dikasih tau dan lewat Yayasan Lumintu, jadi datang ke yayasan bawa dua file semuanya soalnya satu buat yayasan dan satunya lagi buat perusahaan yang kita lamari pekerjaan...” (19 Maret 2018)

Berdasarkan persyaratan secara administratif persyaratan harus dipenuhi oleh tenaga kerja penyandang disabilitas sebelum disalurkan ke perusahaan mitra oleh Yayasan Lumintu. Kemudian, persyaratan juga diperuntukkan bagi Yayasan dan perusahaan yang dituju hal tersebut disampaikan juga oleh pembina Yayasan Lumintu Endang Sulistyorini.

“...Buat lamaran tes, sudah kalau masuk ya sudah punya riwayat-riwayat sendiri dari penyandang disabilitas, dari surat lamaran kita gandakan dua. Buk minta kerja ya bikin lamaran nanti dia buat dari kita masuk ke Lumintu satu ke perusahaan satu, soalnya otomatis perusahaan kalau ada masalah kita yang dihubungi...” (Wawancara, 21 Februari 2018)

Penggandaan persyaratan yang harus dipenuhi tersebut digunakan sebagai dokumen bagi Yayasan Lumintu terkait daftar penyandang disabilitas yang telah mendaftar dan nantinya yang lolos maupun tidak lolos kerja diperusahaan dapat dipantau oleh Yayasan Lumintu. Semua permasalahan kerja ketika penyandang disabilitas telah terjun diperusahaan akan dikonsultasikan kepada pihak Yayasan terkait kondisi penyandang

disabilitas tersebut. Ditegaskan pula oleh pengurus (wakil sekretaris) Yayasan Lumintu Suparti terkait hal tersebut.

“...Ya ada pengawasan mbak, kalau ada apa-apa dari pihak perusahaan kita yang dihubungi, bu anak ini kok gini kenapa terus kita yang nantinya mencari tau (tahu) permasalahannya gimana, kan kita punya CV penyandang disabilitas yang daftar kerja sebelumnya nah kita lihat disitu siapa yang bermasalah kita tanya dan kita cari solusinya pada masalah yang dilakukan, soalnya kan tidak hanya dari daerah Sidoarjo aja mbak, dari luar daerah juga banyak yang melalui Yayasan Lumintu jadi gunanya CV itu juga untuk tau (tahu) latar belakangnya...” (Wawancara, 08 Maret 2018)

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Yayasan Lumintu terkait tenaga kerja penyandang disabilitas tidak hanya sebatas pada saat pengajuan kerja ke perusahaan dan proses perekrutan kerja namun juga pada saat penyandang disabilitas telah diterima dan kerja diperusahaan pengawasan dari pihak Yayasan masih berlangsung, apabila terdapat keluhan dari perusahaan terkait kinerja penyandang disabilitas karena pendaftaran kerja yang dibantu melalui Yayasan Lumintu. Diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh pengurus (ketua

2) Yayasan Lumintu Nurul Hidayah yakni :

“...Ya kayak anak-anak yang sudah masuk kerja gitu mbak, ada yang mau keluar misalnya kayak Leni sama Tian itu mereka sebenarnya udah (sudah) kerja di JAI, lha karena ada masalah sama keduanya dari pihak perusahaan menghubungi kita, terus kita hubungi mereka mbak, kita tanyakan permasalahannya apa nanti dicari solusinya. Ternyata masalahnya dari kedua anak itu saling *membully*, yang Tian itu *bully* si Leni, lha yang Leni akhirnya enggak (tidak) kuat akhirnya mutuskan buat keluar kerja, dan yang si Tiannya akibat *bully* temennya (temannya) itu dia dapat teguran dari perusahaan dan dikeluarkan akhirnya gitu mbak. Padahal mereka itu aslinya anaknya sregep (rajin)...” (Wawancara, 23 Maret 2018)

Pengawasan dilakukan agar penyandang disabilitas yang dahulunya membutuhkan bantuan penyaluran kerja oleh Yayasan Lumintu dapat tersalurkan dan dapat di diperjuangkan haknya secara semestinya baik demi berlangsungnya kerjasama dengan perusahaan mitra dengan penyandang disabilitas kedepannya. Pendaftaran kerja tidak hanya bagi penyandang disabilitas dari daerah Sidoarjo namun penyandang disabilitas seluruh daerah manapun yang membutuhkan kerja dapat meminta bantuan Yayasan dalam menyalurkan pekerjaan di perusahaan mitra. Diperkuat oleh pernyataan yang diungkapkan oleh pengurus (ketua 2) Yayasan Lumintu Nurul Hidayah.

“...Kalau misalkan butuh anak perempuan 5 atau berapa itu mengubungi kami kan yang

mencarikan ya, sebetulnya sudah ada ada anak-anak yang mengajukan lamaran, kami tampung semua kalau memang itu memenuhi dari perusahaan yang diminta kita ajukan kalau tidak memenuhi ya kita *pending* dulu menunggu perusahaan yang memenuhi persyaratan yang diminta..." (Wawancara, 05 Maret 2018)

Upaya pemberdayaan penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pekerjaan yang layak pun tidak hanya bagi penyandang disabilitas yang telah mendapatkan pekerjaan di perusahaan namun juga bagi penyandang disabilitas yang masih gagal dalam bersaing bekerja di perusahaan, seperti diungkapkan oleh Dyas Gilang Pratama (Tuna Rungu).

"...Saya tadi daftar kerja ke JAI Gempol sama teman-teman tapi baru tes kesehatan belum ada panggilan lagi, terus mau nyebar (menyebarkan) daftar ke *Young Tree* pabrik sepatu ini nanti nyoba (mencoba) kesana, tahun dulu juga pernah nyoba (mencoba) daftar ke JAI tapi juga belum lolos jadi tadi nyoba (mencoba) lagi..." (Wawancara, 19 Maret 2018)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Sufi Lutfiansyah (Tuna Rungu) terkait perekrutan tenaga kerja disabilitas di perusahaan.

"...Saya tadi ikut melamar kerja di JAI pabrik kabel sudah tes kesehatan, sekarang saya masih menunggu, kata bu Nurul nanti kalau ada pengumuman dikasih tau mungkin sekitar 3 sampai 7 hari lagi saya pernah nyoba (mencoba) daftar dari tahun lalu tapi juga belum dapat kerja sampai sekarang..." (Wawancara, 19 Maret 2018)

Dalam permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa tidak hanya sekali proses pelamaran kerja di perusahaan bagi penyandang disabilitas sehingga penyediaan pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayasan Lumintu, dikaitkan dengan pekerjaan yang dibutuhkan pihak perusahaan, hal serupa juga diungkapkan oleh pengurus (ketua 2) Yayasan Lumintu Nurul Hidayah.

"...Jadi begini pelatihan desain grafis pelatihan apa itu juga sebenarnya juga kita latih untuk bisa kerja kesana dengan harapan sesuai dengan kemampuannya akan tetapi perusahaan kan mencarinya kan dibagian lain gitu, jadi gak (tidak) *matching* dengan pelatihan yang dilatihkan dengan yang diminta disana. Akan tetapi dipelatihan itu anak-anak kan juga diajari disiplin, lha disiplin kerjanya yang kita terapkan nanti diperusahaan itu diterapkan, gak (tidak) boleh malas-malasan jam kerjanya jam segini jam segini harus *stand by* ya itulah tingkah lakunya terutama perilaku kan kadang-kadang disana desain grafis kadang-kadang kalau anak selama ini belum ada yang dari desain grafis direkrut di perusahaan terus dimasukkan di kantor kan belum ada jarang sekali selama ini hanya di produksi saja, seperti *insert plak*..." (Wawancara, 05 Maret 2018)

Berbagai kondisi jenis kecacatan menentukan jenis pelatihan yang dilaksanakan kenyataannya tidak sepenuhnya *ouput* setelah pelaksanaan pelatihan dapat di aplikasikan sesuai tujuan ingin dicapai, hal tersebut terjadi karena kondisi psikis penyandang disabilitas terkait siap segala kebutuhan dalam memulai berwirausaha menjadi bagian hambatan yang dialami untuk memperoleh pekerjaan layak di sektor informal, disampaikan oleh pengurus (ketua 2) Yayasan Lumintu Nurul Hidayah.

"...Jadi selama pelatihan yang dilaksanakan di Yayasan Lumintu ini *output* yang benar-benar kita inginkan setelah mereka selesai pelatihan itu untuk bisa mandiri dengan buka usaha sendiri itu kelihatannya jarang anak-anak mau buka usaha sendiri mbak, walaupun ada ya mungkin karena dari orang tuanya punya usaha jadi nerusin (meneruskan) punyanya orang tuanya kayak (seperti) siapa itu saya lupa namanya buka usaha *laundry* terus ada yang buka usaha *cathring*, kalau memulai sendiri itu mereka belum ada yang berani..." (Wawancara, 05 Maret 2018)

Adapun selain dari minat penyandang disabilitas dalam berwirausaha masih rendah, juga karena bekerja di sektor formal menjadi daya tarik sendiri baginya secara langsung dapat memperbaiki kondisi kesejahteraan hidupnya. Sebagaimana juga diungkapkan oleh peserta pelatihan Elis Nur Azizah (Tuna Rungu).

"...Aku dulu juga pernah ikut pelatihan desain grafis 2 tahun yang lalu terus tata boga, jadi aku bisa sablon kaos terus menempelkan foto keramik, waktu dulu ikut pelatihan sablon itu desain grafisnya diajari *photoshop* juga jadi bisa buat gambar atau rancangan, rencana mau buka usaha sablon waktu selesai pelatihan tapi endak (tidak) jadi mbak, usaha sendiri takut gak (tidak) laku..." (Wawancara, 13 Maret 2018)

Berbagai faktor proses pemberdayaan penyandang disabilitas pada sektor informal masih rendah pecaiaannya, akibat tidak adanya keberanian memulai sebuah usaha, ketakutan akan proses pengembangan baik dari pengaruh lingkungan masyarakat maupun dalam diri penyandang disabilitas. Sehingga pelatihan yang selama ini dilaksanakan oleh Yayasan Lumintu baik mengarah pada sektor informal maupun formal, minat penyandang disabilitas lebih banyak untuk bisa bersaing kerja di sektor formal. Hal tersebut disampaikan oleh pembina Yayasan Lumintu Endang Sulistyorini.

"...Juga lumayan mbak gaji mereka kalau udah masuk di perusahaan kan kebanyakan tuna rungu ya lha itu gajinya ikut UMR ya sekitar 3 juta keatas mbak, kan besar toh jadi bisa buat biaya hidupnya mbak, tapi juga sebanding sama pekerjaannya..." (Wawancara, 21 Februari 2018)

Pernyataan diatas juga diperkuat seperti apa yang disampaikan oleh pengurus (ketua 2) Yayasan Lumintu Nurul Hidayah.

"...Itu tergantung perusahaannya jadi gitu-gitu kan tergantung perusahaannya kalau di JAI itu

kan kesejahteraannya kan bagus sama kan penanaman modal asing ya punya Jepang, itu dibagian produksi aja diterima anak-anaknya umumnya 3 juta 150 ribu *plus* satu hari 118 ribu terus *plus* yang lain yang lain juga terus sampai sekarang anak-anak sampai terima 6 juta kurang 10 ribu berita terakhir kemarin kata wali murid...”

(Wawancara, 23 Maret 2018)

Pertimbangan peminat lebih banyak terjun disektor formal yakni terkait gaji yang mampu didapatkan lebih banyak dan menjamin kesejahteraan kehidupan yang lebih baik di masa depan menjadi pilihan utama bagi penyandang disabilitas selama ini setelah mengikuti pelatihan. Hal tersebut disampaikan pula oleh pengurus (wakil sekretaris) Yayasan Lumintu Suparti.

“...Gaji mereka kalau udah keterima di perusahaan kan lumayan besar mbak jadi kalau seikhlasnya kan enggak (tidak) begitu membebani mereka juga, gaji mereka kalau udah masuk kerja di perusahaan kan perbulannya sekitar 3-4 jutaan kan mbak cukup besar ya itu mbak, juga bisa buat masa depannya...” (Wawancara, 08 Maret 2018)

Kondisi tersebut didukung data didapatkan di lapangan terkait penyandang disabilitas pernah mengikuti pelatihan di Yayasan Lumintu dan telah mendapatkan pekerjaan di sektor formal, perusahaan mitra Yayasan sebagai berikut: 1. Ranita Warlitanti (tuna rungu) bekerja di JAI bidang produksi (*insert plak*), 2. Ishari Anista Iffani (tuna rungu) bekerja di JAI bidang produksi (*insert plak*), 3. Fitri Dwi Anggi (tuna rungu) bekerja di UFI bidang pasang label, 4. Intan Sugandini (tuna rungu) bekerja di JAI bidang produksi (*insert plak*), 5. Fitri Dwi Anggi (tuna ungu) bekerja di UFI bidang pasang label, 6. Dayat (tuna rungu) bekerja di UFI bidang pasang label, 7. Eveline Natasya Harsono (tuna rungu) bekerja di JAI bidang produksi (*insert plak*), 8. M. Arif Setiawan (tuna rungu) bekerja di SAI bidang produksi, dan 9. Alwindito Yudistira (tuna rungu) bekerja di SAI bidang produksi.

Meskipun minat kerja paling diminati oleh penyandang disabilitas yakni di perusahaan karena menjamin kesejahteraan hidupnya, pada dasarnya telah dilakukan upaya tindak lanjut pada sektor informal oleh Yayasan Lumintu bersama Dinas Sosial, setelah pelaksanaan pelatihan berupa penyediaan fasilitas kepada penyandang disabilitas untuk membuka usaha salon kecantikan sebagai tindak lanjut dari pelatihan tata kecantikan, namun praktiknya menjadi hambatan karena membangun kepercayaan kepada masyarakat sekitar tidak begitu mudah, disebabkan kemampuan penyandang disabilitas masih rendah dan dorongan atau antusias diri tidak begitu kuat menjadi penghalang berhasil dan tidaknya usaha.

Hal tersebut dapat dikaji bahwa solusi yang diusahakan oleh pihak Yayasan Lumintu dalam memperjuangkan hak pekerjaan layak di sektor informal belum sepenuhnya dapat teratasi, namun pada sektor

formal upaya tetap dilakukan agar pula mempersiapkan tenaga kerja penyandang disabilitas lebih meningkat lagi jumlahnya di perusahaan mitra. Pertimbangan hal tersebut maka kesinambungan antara elemen penting guna *output* yang diharapkan terpenuhi dari ketiga elemen yakni pihak sekolah sebagai penghubung alumni penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi pelatihan, kemudian pihak Yayasan sebagai wadah atau jembatan pelaksanaan pelatihan dalam mengasah kemampuan penyandang disabilitas serta penyalur tenaga kerja baik sektor informal juga sektor formal di Sidoarjo, dan orang tua sebagai lingkungan utama pendukung penyandang disabilitas mengembangkan kemampuan dapat terwujud atau tidak.

Hambatan selain kondisi diri penyandang disabilitas, minat, elemen pendukung, juga dana pelaksanaan proses pemberdayaan selama proses pelatihan berpengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan pemberdayaan, hal tersebut dipaparkan oleh pengurus (wakil sekretaris) Yayasan Lumintu Suparti.

“...Hambatannya ini masalah dana mbak, kan kalau kita ngadain (mengadakan) pelatihan juga butuh dana besar mbak, karena dananya segitu banyaknya, ya jadi kita kerjasama dengan Dinsos, jadi Dinsos yang mendanai kita yang mencarikan...” (Wawancara, 08 Maret 2018)

Hal serupa juga disampaikan oleh pengurus (ketua 2) Yayasan Lumintu Nurul Hidayah, bahwa dana dari Dinas Sosial bagi Yayasan waktu pelatihan, namun tidak setelah selesai pelatihan yakni petikan wawancaranya.

“...Dari Dinas Sosial tidak ada pengawasan lagi setelah pelatihan, tapi suatu ketika itu tadi pernah sih mbak waktu sehabis pelatihan tata kecantikan dulu dirasa pengembangannya kurang bagi peserta pelatihan yang dulu pernah ikut maka dari Dinas Sosial buatin (membuatkan) salon kecantikan di dalam sini...” (Wawancara, 05 Maret 2018)

Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat dikaji bahwa tidak semua jenis pelatihan yang telah dilaksanakan terdapat tindak lanjut, menganalisis kondisi pelatihan apakah nantinya perlu adanya tindak lanjut sebagai upaya perwujudan tujuan diadakannya pelatihan atau tidak tergantung kebutuhan dan respon masyarakat terhadap usaha penyandang disabilitas, sehingga pada pelatihan tata boga tidak ada tindak lanjut pencapaian tujuan agar dapat berwujud yang mengakibatkan pula antusias diri untuk berwirausaha masih rendah dan tidak terdapat pengawasan. Hambatan tidak hanya terjadi pada saat setelah pelaksanaan terkait tindak lanjut yang dilakukan dalam sektor informal, pada sektor formal hambatan terjadi pada waktu perekrutan kerja di perusahaan mulai dari persyaratan administrasi disamakan seperti non penyandang disabilitas, tes keterampilan, hingga tes wawancara yang membutuhkan pemahaman

lebih dalam menggali informasi atau kepribadian tenaga kerja penyandang disabilitas yang akan melamar pekerjaan di perusahaan mitra yakni JAI (Jatim Autocomp Indonesia), SAI (Surabaya Autocomp Indonesia), UFI (United Farmatic Indonesia), Young Tree, First Media Farma, dan PT. Sido Jangkung. Diungkapkan oleh pernyataan dari pengurus (ketua 2) Nurul Hidayah Yayasan Lumintu.

“...Syaratnya kayak anak *regular* yang dipakek (dipakai), kita sebenarnya sudah nego (menawar) mbak syarate (syaratnya) jangan disamakan po’o (toh) terlalu ideal gitu untuk anak difabel, sudah diusahakan tapi masih belum bisa harus memenuhi syarat seperti anak normal, padahal banyak penyandang disabilitas yang usianya sudah dewasa mereka telat dulu masuk sekolahnya jadi waktu lulus sudah tua-tua usianya jadi itu yang bikin perusahaan gak (tidak) mau...” (Wawancara, 05 Maret 2018)

Terkait kendala tindak lanjut di sektor formal juga dialami langsung oleh penyandang disabilitas yang menjadi pelamar pekerjaan di perusahaan yakni Dyas Gilang Pratama (tuna rungu), petikan wawancaranya sebagai berikut.

“...Saya tadi daftar kerja ke JAI Gempol sama teman-teman tapi baru tes kesehatan belum ada panggilan lagi, terus mau nyebar (menyebarkan) daftar ke Young Tree pabrik sepatu ini nanti nyoba (mencoba) kesana, tahun dulu juga pernah nyoba (mencoba) daftar ke JAI tapi juga belum lolos jadi nyoba (mencoba) lagi...” (Wawancara, 19 Maret 2018)

Dalam persyaratan penerimaan penyandang disabilitas di setiap perusahaan berbeda satu dengan yang lain, sebagaimana observasi pada tanggal 23 Maret 2018 dan data yang didapatkan di lapangan yakni persyaratan administrasi, tes wawancara, dan tes keterampilan meliputi Surat lamaran pekerjaan, daftar riwayat hidup, *fotocopy* KTP, *fotocopy* KK, *fotocopy* akte, surat keterangan sehat dari dokter, pas foto ukuran 4x6 (2 lembar), dan *fotocopy* SKCK, serta untuk tes keterampilan Yayasan Lumintu membuat media buatan yang biasanya digunakan perusahaan pada waktu tes keterampilan pada penyandang disabilitas serta bentuk contoh tes tulis dari Yayasan Lumintu. Berbagai upaya dilakukan demi penyandang disabilitas juga mampu bersaing disektor formal salah satunya pengupayaan tersebut.

Stigma negatif yang telah mengakar di dalam masyarakat saat memandang kondisi penyandang disabilitas menyebabkan diskriminasi bagi orang-orang yang mengalami keterkecualian yakni penyandang disabilitas. Padahal nilai dan makna dalam ekspresi kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Kabeer (2014: 4) terkait keadilan, perlakuan sama bagi mereka yang berbeda harus dilakukan guna memakmurkan rakyatnya

dengan adanya pengakuan setiap hak yang dimiliki oleh warga negara maka perlu adanya kesempatan bisa beraktivitas dan berkegiatan dalam memperbaiki kehidupannya. Keadilan pada penelitian ini menyangkut bagaimana semua jenis penyandang disabilitas memiliki kesempatan ikut pelatihan tanpa ada pengecualian baik tuna rungu, tuna grahita, maupun tuna daksa tidak terdapat perbedaan pelayanan ketika proses pelatihan. Keadilan nantinya dapat digunakan sebagai awal adaptasi atau *adaptation* (A) merupakan penyesuaian diri apabila telah diterima oleh masyarakat melalui kebutuhan yang dibutuhkannya dengan Yayasan Lumintu sebagai tempat penyesuaian melalui berbagai upaya (Ritzer and Goodman, 2010: 121).

Pembedaan tujuan pelatihan yang ditujukan tidak hanya untuk membentuk kemandirian dan menghasilkan jiwa wirausaha di sektor informal namun mempersiapkan tenaga kerja penyandang disabilitas yang memenuhi standart dari perusahaan di sektor formal. Berbagai upaya dilakukan yayasan, guna mewujudkan pemberdayaan yang mampu membentuk penyesuaian pada diri penyandang disabilitas guna menghasilkan tujuan yang diinginkan melalui ikatan kerjasama dengan Dinas Sosial dan perusahaan mitra. Mempertimbangkan *output* setelah pelatihan demi kesejahteraan hidupnya, maka berbagai pelatihan pernah dilaksanakan tidak terlepas dari pertimbangan matang berdasarkan jenis kecacatan, jenis pelatihan, kebutuhan pasar masyarakat saat ini, serta prospek kerja yang dibutuhkan di perusahaan mitra. Namun senyatanya keadilan berupa penyesuaian yang diupayakan Yayasan Lumintu bagi penyandang disabilitas belum bisa maksimal karena pelaksanaan pelatihan selama ini peluang besar masih dimiliki oleh tuna rungu dan tuna grahita, karena dari kedua jenis penyandang tersebut jenis kecacatannya dapat diterima oleh masyarakat. Sebagaimana diatas telah disampaikan bahwasannya tindak lanjut setelah pelaksanaan pelatihan tidak diberlakukan pada semua jenis pelatihan maka terjadi ketidakberhasilan pemberdayaan penyandang disabilitas pada sektor informal. Menyebabkan keadilan dalam penyesuaian diri antara proses pemberdayaan dan respon masyarakat belum terbangun kepercayaan dengan baik.

Pengakuan terhadap kedudukannya ditengah kehidupan bermasyarakat juga perlu diperjuangkan, dimana pengakuan merujuk bahwa adanya Yayasan Lumintu memiliki kepedulian kepada penyandang disabilitas untuk mengeksplorasi kemampuannya agar tercapainya kesetaraan dan kesamaan hak (Kabeer, 2004: 4). Maka terdapat penghubung tercapainya suatu tujuan (*goal attainment*) (G) dengan dibentuknya hubungan (*integration*) (I) antara pihak Yayasan Lumintu bersama Dinas Sosial, Yayasan Lumintu bersama perusahaan

mitra, hal tersebut sebagai upaya agar sistem dapat mempertahankan posisi dan keadaan tujuan yang ingin dicapai. Dimana mempertahankan pengupayaan pemberdayaan dengan menjalin kerjasama agar proses dapat terus berjalan sesuai harapan demi kehidupan penyandang disabilitas melalui adanya pelatihan guna memberikan bekal atau kemampuan dalam mengasah potensi diri jika nantinya terjun dalam lingkungan masyarakat. Kemudian, kerjasama agar tidak hanya mengasah kemampuan diri agar memiliki kemampuan berwirausaha juga kemampuan bersaing di bidang industri.

Kesinambungan antara pelatihan dengan kebutuhan kerja di perusahaan juga di pertimbangkan oleh Lumintu salah satunya sebagai bentuk perwujudan penjaminan hak memperoleh pekerjaan yang layak seperti orang normal, yakni seperti pelatihan desain grafis dan pelatihan mejahit memiliki peluang kerja di perusahaan JAI, SAI, dan Young Tree/pabrik sepatu. Sedangkan pelatihan tata boga dan tata kecantikan diharapkan memiliki peluang untuk berwirausaha membuka jasa *cathring* maupun salon kecantikan. Meskipun begitu telah dibentuk dan diadakan sebuah hubungan kenyataannya tidak mampu menjamin terpenuhi hak penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan yang layak, karena diantara penyandang disabilitas yang ikut terjun kerja di sektor informal maupun formal, banyak diantaranya tidak memiliki relevansi antara bidang pelatihan dengan kebutuhan kerja, sehingga ketidakjelasan tujuan yang ingin dicapai pada sektor informal maupun formal. Maka pengupayaan agar pengakuan bagi penyandang disabilitas yaitu Yayasan Lumintu terus bernegosiasi agar persyaratan kerja baginya tidak disamakan seperti non penyandang disabilitas serta pada bidang usaha Yayasan Lumintu berupaya meyakinkan masyarakat melalui tindak lanjut berupa pendirian salon atau usaha lain yang dilakukan penyandang disabilitas di lingkungan dapat diterima.

Maka penentuan nasib sendiri bagi penyandang disabilitas sangat perlu dilakukan guna mendorong semangat untuk terus mengupayakan *latency* (L) atau pemeliharaan pola sebuah sistem dari Yayasan Lumintu yang terus diperbaiki agar sesuai prospek kerja tujuan (Ritzer and Goodman, 2010: 121). Pemeliharaan pola atau mempertahankan kondisi yang telah dilaksanakan oleh penyandang disabilitas selama pelatihan hingga bekerja baik di sektor informal maupun formal, dapat terus berjalan atau continue, agar harapan pemenuhan hak memperoleh pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi dan dapat memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Tidak hanya dukungan dari pihak Yayasan Lumintu supaya semua dapat terwujud tetapi dukungan semua elemen, juga pihak keluarga karena dorongan juga berasal dari luar diri penyandang

disabilitas, maka keluarga memiliki peran memberikan motivasi dan keyakinan agar mampu mandiri. Serta pada penyandang disabilitas itu sendiri, karena meskipun semua telah diupayakan seperti pelatihan, tindak lanjut baik bidang usaha juga bidang industri tidak dapat tercapai jika dalam diri tidak terdapat kemauan untuk berubah dan mandiri.

PENUTUP

Simpulan

1. Pemberdayaan berbentuk pelatihan dilaksanakan Yayasan Lumintu guna mengupayakan pemenuhan penyandang disabilitas memperoleh hak pekerjaan yang layak baik di sektor informal maupun formal melalui berbagai pertimbangan serta dukungan kerjasama antara Yayasan Lumintu dan Dinas Sosial, Yayasan Lumintu dan perusahaan sebagai upaya perwujudan nilai-nilai *inclusive citizenship* belum maksimal, karena elemen pendukung masih tumpang tindih antara Yayasan Lumintu, keluarga, dan penyandang disabilitas. Sebagaimana teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parson yakni AGIL (*Adaptation*), (*Goal Attainment*), (*Integration*), dan (*Latency*) yakni dari upaya penyesuaian Yayasan Lumintu dengan kondisi penyandang disabilitas, pelaksanaan pelatihan mengarah tujuan awal diadakannya pelatihan agar penyandang disabilitas dapat berdaya melalui pelatihan dan pertahanan pola hubungan ketiga elemen tersebut serta *output* yang dihasilkan belum sepenuhnya berhasil, karena tujuan/*goal attainment* dan *latency* belum dapat terlaksana sesuai rencana.

2. Hambatan pelaksanaan pelatihan hingga perekrutan kerja di perusahaan mitra Yayasan terkait kondisi kecacatan, kemauan, dan kemampuan serta kriteria tenaga kerja penyandang disabilitas yang diterapkan oleh perusahaan, menyebabkan pemenuhan kerja di sektor formal masih belum dapat dicapai secara maksimal, serta antusias atau minat penyandang disabilitas dalam dunia kerja sektor informal masih rendah kemandirian sebagai tujuan pelatihan belum dapat terbentuk dan masih jauh dari harapan.

Saran

Berdasarkan pertimbangan hasil penelitian, maka saran untuk semua pihak :

1. Bagi pemerintah hendaknya memberikan perhatian lebih terhadap kondisi penyandang disabilitas dengan ikut membantu lembaga atau yayasan bergerak dalam memperjuangkan hak untuk memperoleh pekerjaan layak dengan memberikan bantuan modal setelah pelatihan, penambahan kuota tenaga kerja penyandang disabilitas untuk bekerja di perusahaan, dan pembinaan lanjutan guna membangkitkan semangat kerja.
2. Adanya kegiatan lain untuk menunjang agar hak penyandang disabilitas dapat terwujud secara maksimal,

yakni tindak lanjutan untuk mengontrol hasil dari pelatihan agar tujuan dapat terwujud, dan bersifat kontinue.

DAFTAR PUSTAKA

- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Terjemahan M. Z. Lawang. Jakarta: PT. Gramedia
- M. Poloma, Margaret. 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muladi (Ed.). 2009. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Impikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Ritzer, George dan I. Goodman, Douglas. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. CV. Alfabeta
- Kabeer, Naila. 2004. *The Search Inclusive Citizenship: Meaning And Expression In An Inter-Connected*. Diakses pada 23 Desember 2017 melalui <http://archive.ids.ac.uk/drcitizen/system/assets/1052734474/original/1052734474-kabeer.2005-introduction.pdf>
- Turner, S., Bryan. 2009. *Thinking Citizenship series T.H. Marshall, Social Right and English National Identity*. Vol. 13, No. 1, February 2009, 65-73. Diakses pada 30 Januari 2018 melalui <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5iG65jOZQ4UJ:www.urbanlab.org/articles/Turner%2520B%2520th%2520Marshall%2520social%2520rights.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-ab>
- Badan Pusat Statistika. 2010. Penduduk Menurut Wilayah dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi Kabupaten Sidoarjo, (Online), (<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?search-tabel=Penduduk+Menurut+Wilayah+dan+Tingkat+Kesulitan+Mengingat%2FBerkonsentrasi&tid=280&search-wilayah=Kabupaten+Sidoarjo&wid=3515000000&lang=id> diakses pada 25 Januari 2018)
- Badan Pusat Statistika. 2010. Penduduk Menurut Wilayah dan Tingkat Kesulitan Melihat Kabupaten Sidoarjo, (Online), (<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?search-tabel=Penduduk+Menurut+Wilayah+dan+Tingkat+Kesulitan+Melihat&tid=274&search-wilayah=Kabupaten+Sidoarjo&wid=3515000000&lang=id> diakses pada 25 Januari 2018)
- Badan Pusat Statistika. 2010. Penduduk Menurut Wilayah dan Tingkat Kesulitan Mendengar Kabupaten Sidoarjo, (Online), (<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?search-tabel=Penduduk+Menurut+Wilayah+dan+Tingkat+Kesulitan+Mendengar&tid=276&search-wilayah=Kabupaten+Sidoarjo&wid=3515000000&lang=id> diakses pada 25 Januari 2018)
- Badan Pusat Statistik. 2010. Penduduk Menurut Wilayah dan Tingkat Kesulitan Berjalan/Naik Tangga Kabupaten Sidoarjo, (Online), (<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?search-tabel=Penduduk+Menurut+Wilayah+dan+Tingkat+Kesulitan+Berjalan+atau+Naik+Tangga&tid=278&search-wilayah=Kabupaten+Sidoarjo&wid=3515000000&lang=id> 25 Januari 2018)
- Badan Pusat Statistika. 2010. Penduduk Menurut Wilayah dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri Kabupaten Sidoarjo, (Online), (<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?search-tabel=Penduduk+Menurut+Wilayah%2C+Daerah+Perkotaan%2FPerdesaan&2C+dan+Jenis+Kelamin&tid=264&search-wilayah=Kabupaten+Sidoarjo&wid=3515000000&lang=id> diakses pada 25 Januari 2018)
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo. 2016 Data Kependudukan Kabupaten Sidoarjo, (Online), (<http://disdukcapil.sidoarjo.kab.go.id/> diakses pada 20 November 2017)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia